

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN ENREKANG

Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan

Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang

Sidenreng Rappang, Indonesia

israwati@gmail.com, ahmadmustanir74@gmail.com, rohadyramadhan.@yahoo.co.id

ABSTRAK — Implementasi sistem informasi pada instansi pemerintah pada khususnya, cukup berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengembangkan teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi terkait pengelolaan keuangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektifitas penerapan teknologi informasi dan hubungannya dengan pengawasan yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Enrekang dengan SKPD nomor 41 unit. Analisis tersebut menunjukkan efektifitas sistem informasi keuangan daerah di Kota Enrekang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Kota Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan total sampling 41 kuesioner. Untuk menguji sejauh mana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), maka menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap variabel independen, maka dengan menggunakan koefisien determinasi. Hasil akhir dari analisis tersebut menunjukkan bahwa efektifitas penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara signifikan terhadap ketepatan waktu dan

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Enrekang walaupun agak kekurangan tenaga.

Kata Kunci : Efektivitas dan penerapan

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrative dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi

internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-Government.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan APBD yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini

secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari (PP No. 24 Tahun 2005): (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami? Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sector publik, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik

dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang pada periode 2014 telah meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini memberikan artibahwa masih adanya sejumlah cacatan yang harus ditindak lanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Peraturan pemeriksaan menyatakan catatan tersebut harus ditindak lanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam waktu 60 hari ke depan. Jika tidak, maka Pemkab. Enrekang terancam kena sanksi administrasi. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk segera menata secara baik dan benar tentang pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah terutama mengenai dokumen-dokumen yang sah atas kepemilikan lahan aset dan dokumen pertanggungjawaban dari setiap belanja pegawai.

Namun sangat disayangkan tata kelola administrasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Enrekang yang tadinya sudah mendapatkan opini WDP (tahun anggaran 2014), justru mengalami kemunduruan yang sangat tajam dengan diraihnya opini dari BPK dengan predikat *Disclaimer* untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diatas,

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bagaimanakah pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Pemkab. Enrekang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang” dengan tujuan Untuk mengetahui Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pengawasan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya, Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif dalam membuat pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik informasi, yaitu tepat waktu. Santika (2003:73) menyatakan indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (a) mencatat (*record*); (b) menyimpan (*store*); (c) mengolah (*process*); (d) mengambil kembali (*retrive*); (e) mengirim (*transmit*); dan (f) menerima (*receive*) informasi. Menurut Mulyanto (2009:43) teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi menurut Lantip (2011:1) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011).

Teknologi informasi dalam Indriantoro (1996) yang mengacu pada definisi yang digunakan oleh The management in the 1990s Research Program terdiri dari enam elemen yang terintegrasi dan berevolusi: Perangkat keras (*hardware*), berkisar dari mainframe skala besar sampai micro computer skala kecil, perangkat lunak (*software*), berkisar dari bahasa COBOL dan ekuivalen generasi keempatnya sampai expert system yang muncul seiring dengan perkembangan dalam artificial intelligence (kecerdasan tiruan), jaringan (*networking*), berkisar dari publik ke privat, broadband ke narrow brand Workstation, Berkisar dari yang dirancang insinyur, dengan kapabilitas komputasi besar dan kemampuan untuk menyajikan grafik warna tiga dimensi, sampai workstation profesional yang digunakan oleh karyawan bagian pinjaman suatu bank atau analis pasar perusahaan consumer goods, robotik. Berkisar dari robot dengan “pandangan” dan “tangan” yang digunakan di pabrik ke berbagai alat yang sangat biasa bagi umumnya orang, seperti automatic teller machine, smart chips, Chips “pintar” yang digunakan pada produk untuk meningkatkan fungsionalitas atau reliabilitas. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan Cash *et al.* (1992) dalam Indriantoro (1996) teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan dengan komputer, telekomunikasi, dan otomasi kantor. Teknologi yang berbasis internet digunakan untuk mendukung, mempermudah dan mengotomatisasi interaksi antara pemerintah dan stakeholder-nya. Diharapkan penggunaan teknologi informasi tersebut mampu mengurangi pengeluaran, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperbarui proses administrasi (Achjari, 2003).

Menurut Diamond dalam Mulyana (2006 :124) Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (Kepala Desa) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa

umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Berikutnya, Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal(16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsure pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah. Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem

yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
3. Struktur APBD,
4. Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
5. Penyusunan dan penetapan APBD,
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD,
7. Penatausahaan keuangan daerah,
8. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
10. Pengelolaan kas umum negara,
11. Pengelolaan piutang daerah,
12. Pengelolaan investasi daerah,
13. Pengelolaan barang milik negara,

14. Pengelolaandana cadangan,
15. Pengelolaan utang daerah,
16. Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
17. Penyelesaian kerugian daerah,
18. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bastian (2007) sistem pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Unsurunsur pokok dalam sistem pengendalian intern adalah: pertama, struktur organisasi yang memisahkan secara tegas tanggung jawab fungsional. Pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi-fungsi operasi dengan penyimpanan membuat catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Dalam pelaksanaan transaksi terdapat pengecekan internal diantara unit organisasi pelaksana. Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan dan melihat pengaruh penggunaan teknologi informasian pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pemerintah Kabupaten Enrekang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 41 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan Inspektorat.

Adapun tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan, sedangkan tehnik analisis data yaitu analisis data secara deskriptif kuantitatif,

dengan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik. Selanjutnyan dianalisis dengan analisis deskriptif uji regresi berganda dan pengujian hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009), menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keter-pahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (seperti, jaringan dan *software*).

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel II, variabel pemanfaatan teknologi informasi, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kabupaten Enrekang, yaitu sebesar 50,66%, dimana pernyataannya “Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dinas/instansi di dalam mengolah data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan

peraturan perundangundangan yaitu Sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. (PP 65 /2010). Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

Alasan Utama Penggunaan IT atau teknologi Informasi dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah kabupaten Enrekang adalah efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Alasan lain termasuk peningkatan efektifitas, mencapai hasil/output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu di tambah dengan perlindungan atas aset Pemerintah Daerah. Dunia akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin kompleks, bukan hanya pada Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah tapi secara terinci menjurnal setiap belanja dan mencatat ke dalam buku besar. Teknologi informasi sangat berperan dalam kesuksesan kerjakhususnya di bidang keuangan SKPD yaitu Pembuat LKPD, pengurus asset, PPK, bendahara pengeluaran dll di setiap SKPD.

Sebuah solusi software berbasis aplikasi yang ringan, cepat, mudah digunakan, dan otomatis mencetak laporan keuangan utama seperti neraca, laba rugi, laporan keuangan

pelengkap seperti cash flow, hutang piutang, buku besardan pencatatan pembukuan dari bendahara pengeluaran. Aplikasi ini yang ada di Kabupaten Enrekang akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Setiap kali ada masalah atau ada hal hal yang perlu di tambahkan akan di update menyesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai Amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri no 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Permendagri tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka memberikan kemudahan setiap SKPD untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual tersebut, maka aplikasi ini hadir di kabupaten Enrekang. Aplikasi ini di tujukan bagi Pejabat Penatausaha Keuangan setiap dinas / instansi atau fungsi akuntansi yang akan menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi komputer.

Kabupaten Enrekang baru sekitar 2 tahun menggunakan aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) khusus di bidang keuangan untuk mencatat secara terperinci setiap transaksi keluar dan masuknya uang di setiap SKPD. Pejabat Penatusaha Keuangan (PPK) di setiap SKPD juga menggunakan aplikasi tersebut membuat surat perintah membayar (SPM) atas pencairan dana rutin dan dana rekanan. Aplikasi ini dirancang satu file untuk satu bulan, namun dapat juga digunakan untuk satu tahun anggaran. Contoh penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Pemda Berbasis Akrual berbantuan komputer yang di rancang oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang di bentuk dalam satu file aplikasi, terdiri atas tiga menu utama yang dirinci menjadi sebelas menu, yaitu: Menu Setup User, Setup User, Bagan Akun Standar (BAS) Menu Input Data, Saldo Awal, Input Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Input Jurnal, Menu Cetak, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca.

Namun masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan aplikasi yang terdapat di setiap SKPKD Kabupaten Enrekang khususnya bagi PPK dalam membuat laporan keuangan. Seharusnya PPK SKPD hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (sheet). Selanjutnya aplikasi secara otomatis akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo, dan laporan-laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, tapi hal ini masih dikerjakan secara manual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK (Rekening Koran). Rekening tersebut sudah dihilangkan melalui jurnal eliminasi. Langkah 1 (Kertas Kerja)

1. Fungsi Akuntansi di SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
2. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari Neraca Saldo Satuan Kerja menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom “Neraca Saldo Pemda” yang terdapat pada Kertas Kerja.
3. Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat “reciprocals”. Akun Reciprocal adalah akun-akun Rekening Koran (RK).
4. Fungsi Akuntansi di SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

5. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.
6. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.
7. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Langkah 2 (Jurnal Penutup). Jurnal penutup adalah jurnal akhir yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Jurnal Penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh setiap SKPD di kabupaten Enrekang dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

1. Ketaatan terhadap APBN / PABD.
2. Informasi tentang realisasi pendapatan – LRA, belanja, surplus / defisi LRA.
3. Pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Juga

mengenai informasi realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektifitas penggunaan anggaran. Bukan cuma pemanfaatan teknologi aplikasi SIADINDA yang digunakan para pembuat laporan keuangan di setiap SKPD kabupaten enrekang tapi di bidang Aset pun terdapat aplikasi khusus yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Dengan adanya teknologi informasi mengenai Aset pemerintah daerah akan dapat memenuhi fungsi fungsi :

1. Pemerintah Daerah mempunyai informasi yang akurat mengenai Barang dan Aset Daerah.
2. Penyelenggara Proses Penganggaran kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.
3. Adanya standarisasi kode barang setiap dinas/instansi.
4. Proses Pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada efisiensi dan efektifitas biaya.
5. Pemanfaatan setiap jenis barang atau aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya

Pemanfaatan teknologi Informasi tersebut sangat mempengaruhi ketepatan waktu dan kemudahan dalam penginputan serta menelusuri anggaran dan barang-barang milik pemerintah daerah Kabupaten Enrekang agar terciptanya pelaporan keuangan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personal yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja setiap dinas atau instansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Proses pengerjaan pelaporan aset menjadi lambat di karenakan ada beberapa contoh kasus yaitu perintah dalam aplikasi yang belum bisa mengcover penggabungan aset rehab dengan induk sehingga masih di kerjakan secara manual, sehingga proses penyusunannya pun di kerjakan secara manual. Aplikasi yang di sediakan oleh pihak BPKP masih terus dalam tahap

pengembangan. Laporan Aset menjadi tidak efisien dan tepat waktu sehingga menghambat para tim LKPD di setiap dinas / instansi membuat laporan keuangan.

Visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja” *Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD*”.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

- a. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

e. Hasil pengembangan adalah sebagai berikut:

1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5.	Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6.	Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi
7.	Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Tapi di Kabupaten Enrekang hasil pengembangan dari BPKP yang masuk hanya Teknologi Informasi Mengenai Penertiban aset dan cara pelaporannya yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) yang di kelola setiap SKPD Kabupaten Enrekang bukan hasil pengembangan dari BPKP melainkan dari vendor selaku pihak ketiga yang menyediakan Aplikasi tersebut dan menempatkan operator khusus non PNS yang menguasai aplikasi SIADINDA di Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kenyataan selama ini di setiap Dinas / Instansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang menggunakan Teknologi Informasi bidang Keuangan hanya di gunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK saja, tetapi bidang keuangan tidak saja melibatkan bendahara pengeluaran tetapi juga Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji pembuat LKPD. Mereka juga perlu menggunakan teknologi informasi yang tertuang dalam aplikasi agar memudahkan pekerjaan dan pelaporan.

Jika Pelaporan keuangan tersebut masih dilakukan secara manual, berkuat dengan tumpukan kertas, kalkulator, membuat dan mengisi kolom-kolom transaksi, serta harus teliti dalam mencatat data keuangan yang penting. Tentu saja ini akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Belum lagi adanya resiko human error dalam melakukan kalkulasi. Dengan menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Keuangan, akan membuat pencatatan menjadi

lebih mudah, teratur, dan memberikan hasil yang akurat. Tidak hanya semata-mata menghindari kesalahan kalkulasi, tapi juga memberikan tinjauan yang menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Walaupun respon Pemerintah Kabupaten Enrekang baik terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan sudah berpengaruh positif tapi masih perlu bekerja keras. Karena masih banyak kekurangan pada setiap aplikasi yang ada. Pengembang aplikasi selaku vendor swasta dan pihak BPKP perlu banyak mengupdate atau menambahkan sistem aplikasi secara lengkap sesuai kebutuhan dan permasalahan di setiap SKPD.

Terdapat juga beberapa SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Apabila Teknologi Informasi bisa di manfaatkan dengan baik dan di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan Aplikasi yang maju tentunya pengolahan data, penyusunan dan pelaporan keuangan bisa tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tidak juga di pungkiri kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya brainware (sumber daya manusia) yang mempunyai kualitas yang memadai dalam mengelola teknologi informasi keuangan daerah. Kendala lain adalah faktor keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, Pengadaan perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis, serta perangkat lunak yang belum terintegrasi berpadu (bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh). Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian oleh BPKP mengindikasikan belum maksimalnya upaya

pemda dalam mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari sedikitnya pemerintah daerah yang telah membuat kebijakan tentang: sistem dan prosedur aplikasi akuntansi keuangan; sistem dan prosedur penggunaan aplikasi kinerja; kebijakan tentang standar spesifikasi hardware teknologi informasi pemerintah daerah; dan keamanan (security) data/ informasi keuangan daerah; serta jenis informasi keuangan daerah yang perlu dimuat dalam website. Kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang hendaknya juga merancang sistem aplikasi komputer yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yaitu brainware (Programmer) ,koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya. Karena tata kelola administrasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Enrekang masih kurang maju secara teknologi hingga terdapat sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Sehingga Kabupaten Enrekang mengalami kemunduran dengan opini dari BPK yakni *Disclaimer* untuk tahun anggaran 2015.

Selanjutnya, Pengawasan keuangan daerah, kita harus mengetahui subjek- subjek dalam pengawasan keuangan daerah tersebut, untuk mengetahui hal tersebut kita dapat melihat dalam dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah bendahara umum daerah yang diberi kewenangan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga eksternal yang merupakan dua badan yang yang berbeda, namun kedua-duanya juga ikut dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas internal atau juga Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten/kota. Pengawasan internal merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh badan external yang secara struktural berada diluar pemerintahan yaitu dilakukan oleh badan independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , adapun lingkup pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang memuat semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh *kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait*. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 378 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota. Kedudukan tersebut menyebabkan independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan akan sulit dilakukan, karena pengaruh dan intervensi dari kepala daerah tidak dapat dihindari, sehingga terkesan bahwa inspektorat provinsi, kabupaten / kota merupakan perangkat daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkesan lebih melindungi serta mengamankan kebijakan dan kepentingan pribadi kepala daerah daripada melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Terjadi banyak penyimpangan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal.

Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah jika semakin baik pengawasan keuangan daerah maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah

tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fikri (2011), pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 12, variabel pengawasan keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kabupaten Enrekang, yaitu sebesar 81,06%, dimana pernyataannya "Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah". Hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyusun APBD ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memperhatikan perencanaan daerah maka anggaran yang akan digunakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kab Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Agar Laporan Keuangan punya kualitas yang bagus maka pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang perihal pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporannya. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan

kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang lebih tertib sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. Tesis. Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
- [2] Desmiyawati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD Pemda Riau). Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- [3] Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [4] Harifan, Handriko.2009.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang.Tesis .Padijajaran Bandung
- [5] Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- [6] Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- [7] Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- [8] Nasir, Azwir dan Oktari, Ranti. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasidan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. <http://download.portalgaruda.org/article>. di akses 13 Januari 2017.
- [9] Nordiawan, Deddi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.google.com> [20/09/2016]
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [20/09/2016]
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [14] Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat

- [15] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- [16] Sutaryo. 2011. nilai laporan keuangan pemerintah dengan e-government system <http://Sutaryofe.Staff.Uns.Ac.Id/2011/06/20/Nilai-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Dengan-E-Government-System/>
- [17] Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- [18] Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> [9/10/2016]
- [20] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [10/10/2016]
- [21] Wahyuni, Asnita. 2011. Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakaian Keterlibatan Pemakai terhadap Efektivitas Penerapan SIA. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- [22] Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [23] Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- [24] Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIE ST. Pignatelli: Surakarta